

ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2019

Sunarti¹

Aris Eddy Sarwono²

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UNISRI*

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UNISRI*

**Aris_sanur@yahoo.co.id, njarkasi@gmail.com*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan gender sebagai variabel moderasi pada perbankan syariah di Indonesia. Seluruh bank umum syariah Indonesia periode 2012-2018 merupakan populasi penelitian. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 9 bank umum syariah. Data dianalisis dengan Generalized Least Square melalui pendekatan Common effect model. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan keberadaan dewan direksi perempuan tidak memperkuat pengaruh ukuran terhadap tingkat pengungkapan. tingkat profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan, akan tetapi pengaruh profitabilitas akan semakin rendah jika komposisi dewan perempuan semakin sedikit.

Kata kunci: tanggung jawab sosial, bank syariah Indonesia

1. PENDAHULUAN

Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 negara terbesar perekonomian syariah di dunia. Penduduk Indonesia yang sebagian besar menganut agama Islam menjadi alasan tingginya perubahan dan perkembangan ekonomi syariah. Pada tahun 1998, hanya bank syariah yaitu Bank Muamalat yang mampu bertahan menghadapi krisis. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap perbankan syariah dan memicu bank konvensional membentuk bank syariah Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah kedua dan kemudian disusul dengan bank syariah lainnya di Indonesia. Jumlah bank umum syariah Indonesia pada saat ini adalah 12 Bank Umum Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada awal tahun 2019 marketshare perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 5,94%. Farook et al (2011) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa reputasi perbankan setelah krisis global mengalami peningkatan. Menurut Hassan dan Harahap (2010), keuangan islam mampu bertahan

ditengah krisis global, sehingga dianggap mampu menjadi alternatif yang cocok untuk perekonomian dunia modern

Dalam satu dekade terakhir isu Corporate Social Responsibility (CSR) semakin mengemuka. Bouten dan Everaert (2014) mengemukakan bahwa CSR mendapat perhatian yang tinggi oleh semua pihak termasuk pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum. Fenomena ini membuat perusahaan memberikan perhatian penuh pada CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan bisnis perusahaan (Kotler dan Nancy, 2005). CSR merupakan tanggungjawab perusahaan dalam mengembangkan potensi dan mensejahterakan masyarakat karena entitas tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan lingkungan. CSR merupakan salah satu aktivitas pengaplikasian nilai-nilai syariah. CSR dalam pandangan Islam merupakan kewajiban yang mengikuti dalam proses bisnis, bisnis untuk kemshahalatan dan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan

CSR memiliki kaitan erat dengan Corporate Governance. Menurut Bhimani dan Soonawalla (2005), konsep Corporate Governance dan CSR dapat diistilahkan sebagai dua sisi mata uang sama. Corporate Governance dan CSR penting untuk mencapai value added jangka panjang bagi perusahaan (Esa dan Mohd Ghazali, 2012). Kebutuhan untuk pengungkapan dan transparansi dapat menjamin corporate governance lebih baik. Corporate Governance dan CSR terkait dengan kinerja dan laba perusahaan (Baldarelli dan Gigli, 2011).

Pengungkapan CSR merupakan sarana bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai CSR yang dilaksanakan perusahaan. Di Indonesia pengungkapan CSR belum dirasakan penting diantara perusahaan-perusahaan di Indonesia, meskipun pengungkapan CSR telah diwajibkan oleh Undang-undang (Kriyantono, 2015). Pengungkapan CSR di Indonesia menurut Aribi dan Gao (2011), masih mengabaikan faktor budaya dan agama. Pengungkapan informasi CSR harus berdasarkan hukum Islam untuk mendapatkan keyakinan yang memdaia atas terlaksananya kegiatan CSR berdasarkan syariat (Othman dan Thani, 2010).

Berdasarkan teori legitimasi pengungkapan CSR mengindikasikan komitmen atas CSR perusahaan untuk memunculkan pandangan positif terhadap perusahaan. Komitemen terhadap CSR dipengaruhi oleh Corporate Governanace perusahaan. Tata kelola perbankan syariah berpotensi memulihkan kredibilitas dan stabilitas di pasar keuangan internasional ketika terjadi krisis. Kinerja bank mencerminkan bahwa dewan bank syariah lebih independen dibandingkan bank konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013), mekanisme Corporate Governance yang terdiri dari dewan pengawas syariah, dewan komisaris, direksi, dewan komite,

pengendalian internal dan audit eksternal, dan manajemen risiko merupakan indeks pengungkapan CG digunakan untuk menilai tingkat pengungkapan CSR bank syariah.

Keberagaman dalam komposisi dewan direksi dapat diukur menggunakan banyak item seperti gender, usia, etnis, latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja (Bernardi dan Threadgill 2010). Jumlah wanita dalam bisnis syariah menunjukkan peningkatan yang berarti. Berdasarkan laporan Simply Sharia Human Capital (SSHC), jumlah wanita yang ada di direksi bank syariah di Malaysia dan Indonesia meningkat. SSHC akan mengungkapkan peran wanita dalam perkembangan industri keuangan syariah. Peluang sektor ekonomi syariah yang bisa semakin berkembang dengan menggandeng partisipasi semua gender dan kesetaraan.

Ukuran Perusahaan memiliki hubungan dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang banyak digunakan oleh para peneliti yang berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab perusahaan pada laporan keuangan. Perusahaan besar akan memberikan informasi yang lengkap tentang pengungkapan tanggung jawab social perusahaan daripada perusahaan yang kecil. Dalam menentukan besar kecilnya perusahaan dapat menggunakan indicator yang berbeda-beda. (Giannarakis (2014); Said et al. (2009); Khan 2010; Siregar and Bachtiar 2010) dalam melihat ukuran perusahaan dengan menggunakan proxy aset perusahaan yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan CSR.

Profitabilitas terkait dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Giannarakis (2014) menemukan bahwa profitabilitas berhubungan positif dengan CSR yang diukur dengan menggunakan proxy ROS dan ROE. Said et al. (2009) juga menemukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR yang diukur dengan Return On Equity (ROE). Dengan menggunakan teori legitimasi, Menassa (2010) menemukan variabel profitabilitas berhubungan positif dengan CSD pada perbankan di Lebanon yang diukur dengan ROE. Tetapi Siregar and Bachtiar (2010) menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE mempunyai tidak mempunyai hubungan dengan CSR.

Penelitian ini ingin menganalisis apakah pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah di Indonesia akan diperkuat oleh keberadaan dewan perempuan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

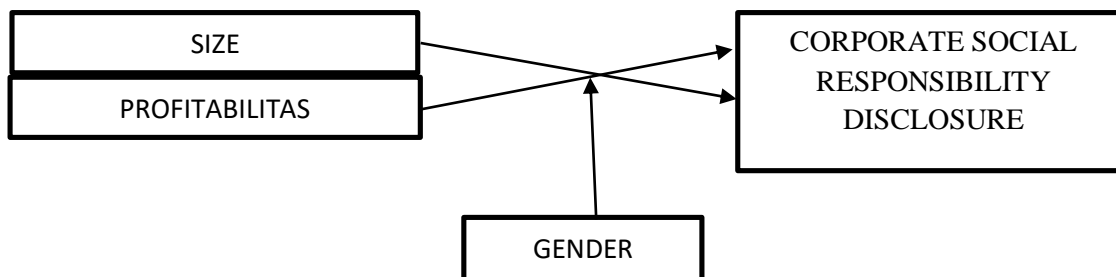
Teori Legimasi

Teori Legitimasi mendukung bahwa dalam melaksanakan tanggung jawa sosial, perusahaan memberikan informasi mengenai CSR sebagai bagian dari dialog dengan masyarakat (Lanis dan Richardson, 2013). Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat merupakan salah satu cara perusahaan dalam melegitimasi kegiatan perusahaan. Legitimasi terdiri dari dua macam pendekatan yaitu pendekatan substantif dan simbolik (Ashfort dan Gibbs, 1990). Pendekatan substantive merupakan pendekatan strategi organisasi diselaraskan dengan norma sosial masyarakat. Pendekatan simbolis, praktik bisnis dilakukan untuk memengaruhi persepsi pemangku kepentingan secara positif tanpa benar-benar melakukan perubahan nyata sehingga pemangku kepentingan bisa salah mengira bahwa perusahaan telah berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi sosial.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Tanggungjawab social adalah serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan direksi dan auditor mengelola tanggung jawab terhadap pemegang saham dan stakeholder. Sehingga pemegang saham dapat memberikan peningkatan kepercayaan terhadap pengembalian dengan adil pada investasi. Pemangku kepentingan mengelola tanggungjawab perusahaan terhadap dampak lingkungan dan masyarakat (Maier, 2005). Tanggung jawab perusahaan menggambarkan komitmen perusahaan kepada pada pemangku kepentingan dalam memegang tanggung jawab perusahaan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Hassan and Harahap, 2010).

Kerangka Pemikiran



Pengembangan Hipotesis

Ukuran Perusahaan mempengaruhi tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang banyak digunakan oleh para peneliti yang berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab perusahaan pada laporan keuangan.

Perusahaan besar akan memberikan informasi yang lengkap tentang pengungkapan tanggung jawab social perusahaan daripada perusahaan yang kecil. Dalam menentukan besar kecilnya perusahaan dapat menggunakan indicator yang berbeda-beda. (Giannarakis (2014); Said et al. (2009); Khan 2010; Siregar and Bachtiar 2010) dalam melihat ukuran perusahaan dengan menggunakan proxy aset perusahaan yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan CSR.

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR

Pengaruh ukuran Perusahaan mempengaruhi tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan diperkuat oleh gender

Giananarkis et al (21014) mengungkapkan bahwa tingginya tingkat dewan perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial. Perusahaan dengan kehadiran wanita dalam anggota dewan cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih kuat dibandingkan yang hanya mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali wanita dalam struktur dewan (Bernardi dan Threadgill, 2010)

H2: Gender merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh ukuran Perusahaan mempengaruhi tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Profitabilitas mempengaruhi tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Giannarakis (2014) menemukan bahwa profitabilitas berhubungan positif dengan CSR yang diukur dengan menggunakan proxy ROS dan ROE. Said et al. (2009) juga menemukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR yang diukur dengan Return On Equity (ROE). Dengan menggunakan teori legitimasi, Menassa (2010) menemukan variabel profitabilitas berhubungan positif dengan CSD pada perbankan di Lebanon yang diukur dengan ROE. Tetapi Siregar and Bachtiar (2010) menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE mempunyai tidak mempunyai hubungan dengan CSR.

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR

Pengaruh Profitabilitas mempengaruhi tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan diperkuat oleh gender

Dewan wanita cenderung menggunakan tanggung jawab sosial untuk menilai kinerja perusahaan (Bernardi dan Threadgill, 2010).

Bernardi dan Threadgill (2010), anggota dewan wanita cenderung lebih memperhatikan kegiatan sosial sehingga akan mempengaruhi pengungkapan CSR.

H4: Gender merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh profitabilitas Perusahaan mempengaruhi tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Profitabilitas mempengaruhi tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi riset seluruh bank syariah nasional di Indonesia yang berjumlah 12 bank. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel menjadi 9 bank syariah. Tahun amatan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dengan populasi yang digunakan adalah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2012-2018. Variable CSR diukur dengan menggunakan indeks ISR. Level pengungkapan berasal dari hasil pembagi antara jumlah skor yang diungkapkan dengan jumlah skor maksimum. Kepemilikan Manajerial dalam penelitian ini diukur dengan cara presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi terhadap saham yang beredar. Gender merupakan keberadaan wanita dalam dewan yang diukur dengan cara menghitung persentasi wanita dalam dewan di sebuah perusahaan, Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan asset perusahaan. profitabilitas yang diukur dengan ROE

Metode Analisis Data

Pemilihan regresi dipilih melalui tahapan pengujian model dan lolos pengujian asumsi klasik. uji *Chow* dan uji *Hausman* serta uji *Breusch-Pagan LM* untuk penentuan model yang tepat. Model data panel ada 3 yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. *Random Effect Model* merupakan model yang mengasumsikan koefisien slope konstan dan intersep berbeda antara obyek individu dan antar waktu. *Generalized Least Square*(GLS).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CSR D = \alpha + \beta \text{ size} + \varepsilon$$

$$CSR D = \alpha + \beta_1 \text{ size} + \beta_2 \text{ gender} + \beta_3 \text{ GS} + \varepsilon$$

$$CSR D = \alpha + \beta \text{ Profitabilitas} + \varepsilon$$

$$CSR D = \alpha + \beta_1 \text{ Profitabilitas} + \beta_2 \text{ GF} + \varepsilon$$

Dimana:

CSR D = *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Size = Ukuran Perusahaan

Profit = Profitabilitas Perusahaan

Gender = dewan perempuan

GS = Gender.Size

GF = Gender.Profitabilitas

Tahapan pengujian model

Uji Chow (Uji F Restricted) menunjukkan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari 0,05. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa model *Common Effect* lebih baik dari model *Fixed Effect* dilanjutkan dengan uji LM. Uji LM untuk melihat model yang terbaik antara *Common Effect* atau *Random Effect*.

4. HASIL DAN DISKUSI

Hasil uji statistik Common Effect Model dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.574666	0.024914	23.06561	0.0000
Size	0.002469	0.000973	2.53697	0.0138
Profitabilitas	0.863974	0.33469	2.581413	0.0123
GS	-0.004735	0.017458	-0.271217	0.7872
GF	-4.740662	2.10446	-2.252674	0.028
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.033425			

Hasil penelitian menunjukkan nilai probabilitas $0,0138 < 0,05$, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang besar dengan nilai aset yang tinggi cenderung akan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih baik dari perusahaan dengan nilai aset lebih kecil. Penelitian Giannarakis (2014); Said et al. (2009); Khan 2010; Siregar and Bachtiar 2010) membuktikan bahwa aset perusahaan yang berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan CSR. Nilai Probailitas GS $0,0123 < 0,05$ menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi perempuan tidak memperkuat pengaruh ukuran terhadap tingkat pengungkapan. Keberadaan dewan direksi perempuan pada sebuah perusahaan tidak mempengaruhi keputusan pengungkapan karena perempuan cenderung lebih fokus pada laba perusahaan. Tingkat profitabilitas menunjukkan angka 0,0123 yang berarti bahwa profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan. Perusahaan yang memiliki laba yang besar cenderung lebih tinggi tingkat pengungkapan taggung jawab sosialnya. Nilai GF menunjukkan angka 0,028 yang berarti pengaruh profitabilitas akan semakin rendah jika komposisi dewan perempuan semakin sedikit. Keberadaan dewan wanita yang cenderung fokus pada perolehan laba akan membuat tingkat pengungkapan menjadi lebih rendah. Dewan wanita cenderung lebih memperhatikan resiko keuangan dibandingkan resiko sosial lainnya (Bernardi dan Threadgill, 2010).

5. KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial harus diungkapkan dengan lebih baik oleh bank syariah di Indonesia karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Bank syariah dengan aset dan laba yang lebih tinggi diharapkan mampu mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arevalo, J.A. and Aravind, D. (2010), "The impact of the crisis on corporate responsibility: the case of UN global compact participants in the USA", *Corporate Governance*, Vol. 10 No. 4, pp. 406-420.
- [2] Aribi, Z. A., and S. S. Gao. 2011. Narrative disclosure of corporate social responsibility in Islamic financial institutions. *Managerial Auditing Journal* 27 (2):199-222.

- [3] Ashforth, B. and B. Gibbs. 1990. The DoubleEdge of Organizational Legitimation. *Organization Science*, 1, 177-194.
- [4] Bouten, L. and P. Everaert. 2014. Social and Environmental Reporting in Belgium: ‘Pour Vivre Heureux, Vivons Cachés’. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 24-43.
- [5] Belkaoui, A., and P. G. Karpik. 2006. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 2 (1).
- [6] Bernardi, R. A., dan V. H. Threadgill. 2010. Women directors and corporate social responsibility. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies* 15 (2): 15–21.
- [7] Bhimani, A. and Soonawalla, K. 2005. From Conformance to Performance: The Corporate Responsibilities Continuum. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol.24. Pp. 165-174. Coase, Ronald H. 1937. The Nature of The Firm. *Economica*. Vol. 4. Pp. 386-405.
- [8] Cormier, D., and M. Magnan. 2014. The impact of social responsibility disclosure and governance on financial analysts’ information environment. *Corporate Governance: The international journal of business in society* 14 (4):467-484.
- [9] Darmadi, S. 2013. Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks. *Humanomics* 29 (1):4-23.
- [10] Esa, Elinda dan Nazli Anum Mohd Ghazali. (2012). Corporate social responsibility and corporate governance in Malaysian government-linked companies. *Journal Corporate Governance* Vol. 12, No. 3, 2012: 292-305.
- [11] Farook, Sayd, M. kabir Hassan dan Roman Lanis. 2011. Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2 (2):114-141.
- [12] Giannarakis, G. 2014. Corporate governance and financial characteristic effects on the extent of corporate social responsibility disclosure. *Social Responsibility Journal* 10 (4):569-590.
- [13] Giannarakis, G., G. Kondeos, and N. Sariannidis. 2014. Financial, governance and environmental determinants of corporate social responsible disclosure. *Management Decision* 52 (10):1928-1951.
- [14] Hassan, A., and S. S. Harahap. 2010. Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management* 3 (3):203-227.
- [15] Hossain, M. 2008. The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. *European Journal of Scientific Research* 23 (4):659-680.
- [16] Jizi, M. i., A. Salama, R. Dixon, and R. Stratling. 2014. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Business Ethics* 125:601-615.

- [17] Kotler, Philip, Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons. 2005.
- [18] Khan, A., M. B. Muttakin, and J. Siddiqui. 2013. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from an Emerging Economy. *Journal Bussines Ethics* 114:207-223.
- [19] Khan, M. H. U. Z. 2010. The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting: Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh. *International Journal of Law and Management* 52 (2):82-109.
- [20] Kriyantono, R. 2015. Public Relations and Corporate Social Responsibility in Mandatory Approach Era in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211:320-327.
- [21] Lanis, R. and G. Richardson. 2013. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory" . *Accounting Auditing and Accountability Journal*, Vol. 26 No 1, pp.75-100.
- [22] Menassa, E. 2010. Corporate social responsibility: An exploratory study of the quality and extent of social disclosures by Lebanese commercial banks. *Journal of Applied Accounting Research* 11 (1):4-23.
- [23] Othman, Rohana, and Azlan Md Thani. 2010. Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal* 9 (4):135-144
- [24] Othman, R., A. M. Thani, dan E. K. Ghani. 2009. Determinan of Islamic Social Reporting Among Top Syariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Jurnal of International Studies*, Vol., No. 12
- [25] Rechner, P. L., and R. Dalton. 1991. Research Notes and Communications CEO Duality and Organizational Performance: A Longitudinal Analysis. *Strategic Management Journal* 12 (2):155-160.
- [26] Runhaar, H. and Lafferty, H. (2009), "Governing corporate social responsibility: an assessment of the contribution of the UN global compact to CSR strategies in the telecommunications industry", *Journal of Business Ethics*, Vol. 84 No. 4, pp. 479-495.
- [27] Said, R., Y. H. Zainuddin, and H. Haron. 2009. The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal* 5 (2):212-226.
- [28] Siregar, S. V., and Y. Bachtiar. 2010. Corporate Social Reporting: Empirical Evidence From Indonesia Stock Exchange. *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management* 3 (3):241-252.
- [29] Stuebs, M., and L. Sun. 2015. Corporate governance and social responsibility. *International Journal of Law and Management* 57 (1):38-52.

[30] Ujijantho, Muhammad Arief dan Bambang Agus Pramuka, (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan Studi pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar

www.brisyariah.co.id

www.mandirisyariah.co.id

www.bnisyariah.co.id

www.bcasyariah.co.id

www.cimbniaga.co.id

www.btn.co.id

www.megasyariah.co.id

www.muamalat.co.id

www.danamon.co.id

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legimasi

Teori Legitimasi mendukung bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, perusahaan memberikan informasi mengenai CSR sebagai bagian dari dialog dengan masyarakat (Lanis dan Richardson, 2013). Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat merupakan salah satu cara perusahaan dalam melegitimasi kegiatan perusahaan. Legitimasi terdiri dari dua macam pendekatan yaitu pendekatan substantif dan simbolik (Ashfort dan Gibbs, 1990). Pendekatan substantive merupakan pendekatan strategi organisasi diselaraskan dengan norma sosial masyarakat. Pendekatan simbolis, praktik bisnis dilakukan untuk memengaruhi persepsi pemangku kepentingan secara positif tanpa benar-benar melakukan perubahan nyata sehingga pemangku kepentingan bisa salah mengira bahwa perusahaan telah berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi sosial.

2.2 Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Tanggungjawab sosial adalah serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan direksi dan auditor mengelola tanggung jawab terhadap pemegang saham dan stakeholder. Sehingga pemegang saham dapat memberikan peningkatan kepercayaan terhadap pengembalian dengan adil pada investasi. Pemangku kepentingan mengelola tanggungjawab perusahaan terhadap dampak lingkungan dan masyarakat (Maier, 2005). Tanggung jawab perusahaan menggambarkan komitmen perusahaan kepada pada pemangku kepentingan dalam memegang tanggung jawab perusahaan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Hassan and Harahap, 2010).

2.3 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

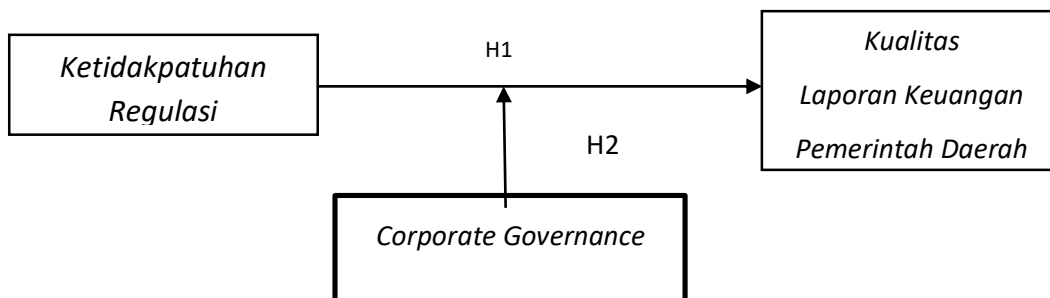
Berdasarkan kerangka pemikirandi atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. **Pengaruh ketidakpatuhan regulasi terhadap kualitas LKPD**
- b. **Peran *Corporate Governace* terhadap pengaruh Ketidakpatuahn Regulasi pada kualitas LKPD**

erdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Good Governace* memoderasi pengaruh Ketidakpatuhan Regulasi terhadap Kualitas LKPD

Kerangka Konseptual Penelitian



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menjelaskan peran *Good Governance* dalam hubungan kausal variabel Ketidapatuhan Regulasi yang dapat mempengaruhi opini audit BPK dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Desain penelitian menganalisis” Perana *Good Governance* dalam hubungan Ketidapatuhan Regulasi terhadap Kualitas LKPD. Penelitian ini merupakan *causal study* yang bertujuan untuk mendapatkan bukti apakah suatu atau lebih variabel dapat menyebabkan perubahan pada variabel yang lain (Sekaran dan Bougie, 2013: 98)

3.2 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemda di wilayah Jawa Tengah Indonesia yang berjumlah 35 entitas. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu atau teknik *purposive judgement sampling*. Kriteria sample dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2010-2014
- b. LHP yang sumber datanya dimiliki peneliti
- c. LHPS memuat data terkait dengan variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian.

Pemilihan kriteria karena tidak semua entitas pemda tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, sehingga berimbas pada pemeriksaan oleh BPK. Tahun penelitian 2010-2014 karena sesuai dengan jangka waktu RJPM yaitu 5 tahun

3.3 Jenis dan Sumber data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang sumbernya berasal dari LHP BPK 2010-2014.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa LHP BPK selama tahun 2010-2014.

3.5 Variabel yang digunakan

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini adalah instrumen yang pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan validitas dan realibilitas pengukuran.

1. Ketidapatuhan Regulasi

Variabel ketidakpatuhan regulasi dalam penelitian ini menggunakan skala rasio berdasarkan jumlah kasus temuan ketidakpatuhan regulasi oleh BPK

2. *Corporate Governance*

Variabel *Corporate Governance* menggunakan proporsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan sebagai pengambil keputusan dengan proksi persentase anggota DPR independen dibandingkan jumlah seluruh anggota DPRD pada masing-masing pemda.

3. *Audit quality*

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Dalam penelitian ini kualitas audit diprosikan dengan menggunakan opini audit BPK. Ukuran variabel opini audit dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan masing-masing opini mengacu pada penelitian Atmaja dan Probohudono (2015).

1 = Tidak Memberikan Pendapat.

2 = Tidak Wajar.

3 = Wajar Dengan Pengecualian.

4 = Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas.

5 = Wajar Tanpa Pengecualian.

Empat opini audit yang diberikan oleh BPK atas LKPD berdasarkan Buletin Teknis SKPN No. 01 yaitu sebagai berikut:

1. Opini WTP (*Unqualified Opinion*).

WTP merupakan pernyataan atas LKPD yang telah disajikan secara wajar pada semua hal yang SAP dan Standar Profesional Akuntan Publik sesuai SKPN. WTP dengan paragraf penjelas merupakan opini audit yang diberikan BPK karena keadaan tertentu, sehingga BPK harus memberikan tambahan suatu paragraf penjelasan sebagai modifikasi opini WTP dalam LHP (Laporan Hasil pemeriksaan).

2. Opini WDP (*Qualified Opinion*).

Opini WDP berisi pendapat auditor BPK bahwa LKPD telah disajikan wajar dalam semua hal material sesuai dengan SAP kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*).

Opini TW memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*).

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat yang diberikan auditor BPK menyatakan bahwa pemeriksa tidak memberikan opini atas laporan keuangan.

3.6 Metode Analisis

Paramater model penelitian atas data panael menggunakan Moderating Regresi Analysis (MRA) dengan bantuan evIEWS 8. Pemilihan regresi dipilih melalui tahapan pengujian model dan lolos pengujian asumsi klasik. Model terpilih adalah model yang telah melewati tahapan pemilihan model terbaik yaitu dengan uji Chow, uji Hausman dan uji LM setelah dilakukan uji atas tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif statistik, uji *Chow* dan uji *Hausman* serta uji LM (*Lagrange Multiplier*) untuk penentuan model yang tepat, uji asumsi klasik dan pengujian kriteria statistik.

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu analisis karakter data berdasarkan parameter *mean*, *median*, *mode*, standar deviasi, tertinggi dan terendah. Parameter tersebut digunakan untuk mengetahui ukuran yang terdapat dalam data Ketidapatuhan Regulasi dan *Good Governance*. Tujuan analisis deskriptif menurut Ghazali (2007: 19) adalah memberikan gambaran data mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, kurtosis dan *Skewness*.

2. Pemilihan Model Data Panel

Dalam pemilihan model data panel yang tepat, ada 3 pendekatan yang digunakan dalam mencari model yang tepat sebelum dipilih model yang terbaik melalui uji *Chow*, uji Hausman dan uji LM (*Lagrange Multiplier*) yaitu:

a. *Pooled Least Square* (PLS) atau *Common Effect Model*

Dalam pengolahan data panel, metode PLS merupakan pendekatan yang paling sederhana. PLS melakukan regresi tanpa memperdulikan sifat *cross-section* dan *time series* pada data (Guzarati dan Porter, 2012: 238). Model *Common Effect* atau *Pooled Least Square Model* merupakan model estimasi data panel menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengestimasi parameternya.

Model PLS tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu sehingga perilaku data antar obyek penelitian sama dalam meskipun dalam waktu yang berbeda. Model *CommonEffect* tidak berbeda dengan OLS yaitu meminimumkan jumlah kuadrat, yang berbeda hanya data yang digunakan

yaitu pada model *Common Effect* menggunakan data panel.

b. *Fixed Effect Model*

Model FE atau *Least Square Dummy Effect* (LSDV) atau *Covariance Model* memperkenankan adanya heterogenitas antar subyek dengan pemberian nilai intersep tersendiri untuk masing-masing entitas (Gujarati dan Porter, 2012: 241)

Model *Fixed Effect* merupakan cara untuk mengestimasi data panel menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Penggunaan variabel *dummy* dalam data panel *Fixed Effect Model* dikenal dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

c. *Random Effect Model*

Dalam model , nilai intersep diasumsikan acak dari nilai populasi yang besar dengan memperhitungkan *error* dari *cross section* dan *time series* (Gujarati dan Porter, 2012, 239). *Random Effect Model* merupakan model yang mengasumsikan koefisien slope konstan dan intersep berbeda antara obyek individu dan antar waktu. Kelemahan dalam *Fixed Effect Model* yang mengakibatkan berkurangnya efisiensi parameter dapat diatasi dengan *Random Effect Model* menggunakan *Generalized Least Square* (GLS).

Dalam penentuan model yang tepat dengan tiga metode tersebut dapat dilakukan dengan uji *Chow* dan uji *Hausman* serta uji LM (*Lagrange Multiplier Test*). Uji *Chow* digunakan untuk menentukan model yang tepat antara PLS dan *Fixed Effect Model*. Jika probabilitas menunjukkan hasil signifikan untuk model *Fixed Effect*, dilanjutkan dengan uji *Hausman*. Uji *Hausman* untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

Jika hasil uji *Hausman* menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk *Fixed, Effect* dilanjutkan dengan uji Breusch-Pagan LM. Namun, jika model *Fixed Effect* lebih signifikan, tidak perlu dilakukan uji LM

3. Uji Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Hal ini agar penelitian bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*).

Asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara *series* dalam bentuk waktu atau *cross sectional*. Uji autokorelasi menggunakan model *Durbin-Watson*. Jika $du < d < 4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif (Ghozali, 2011).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastik dan jika berbeda disebut Heteroskedastik. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastik dan tidak terjadi Heteroskedastik. Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Park*. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah, jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi di antara variabel independen pada model regresi. Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dengan cara menggunakan pendekatan Koutsoyiannis atau dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Berdasarkan latar belakang masalah dan tahapan pemilihan model dapat dibuat persamaan berikut:

$$\text{Kualitas}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{KR}_{it} + \beta_2 \text{KR.CG}_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

α : konstan

Kualitas : Kualitas yang diprosikan dengan opini BPK

KR : Ketidapatuhan Regulasi

CG : *Corporate Governance*

u_{it} : error term

Untuk menghindari bias dalam pembuatan ramalan dengan regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. Perhitungan akan efektif dengan dibantu pengolahan statistik regresi dengan Eviews 8. Dalam uji regresi dilakukan uji t, uji F, dan Koefisien Determinasi.

1) Uji t

Uji t merupakan suatu prosedur untuk menguji signifikansi dari koefisien-koefisien regresi secara parsial. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial variabel independen terhadap dependen. Menurut Gujarati (2003: 129), uji t merupakan uji signifikansi untuk melakukan verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol yang dibuat.

Langkah-langkah pengujian:

a) H_0 diterima dan H_a ditolak $_value > 0.05$

Jika nilai signifikansi lebih dari nilai $alpha$ 0,05, dapat diartikan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

b) H_0 ditolak dan H_a diterima $_value < 0.05$

Jika nilai signifikansi kurang dari nilai $alpha$ 0,05, dapat diartikan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen.

2) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi F kurang dari 5%, berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi F lebih dari 5%, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 %. Secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila signifikansi $< a = 0,05$.

H_0 diterima apabila signifikansi $> a = 0,05$.

3) Koefisien Determinasi (R^2), suatu ukuran kebaikan-kesesuaian

R^2 merupakan nilai koefisien determinasi regresi berganda.. tujuan dari uji kebaikan-kesesuaian untuk mengetahui sejauh mana garis regresi sampel sesuai dengan data. Ketidapatuhan Regulasi dan CG di luar model, yang diwadahi dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R^2 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variable penjelas yang dimasukkan ke dalam model.

BAB 4. JADWAL PENELITIAN

Format Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Presentasi proposal		■										
3	Tabulasi dan Proses Pengolahan data		■	■									
4	Penyusunan Analisa data			■	■								
5	Seminar Hasil					■							
6	Penyusunan Laporan					■							

DAFTAR PUSTAKA

[1] Atmaja, RM Syah Arief dan Probohudono, W Agung Nur. 2015. Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS1* (1): 81-110. Diakses Tanggal 19 Februari 2016

Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2009*.

_____. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2010*.

_____. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011*.

_____. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012*.

_____. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2013*.

_____. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2014*.

[2] Bakhtiar, Nawawi, J., Tahir, H., dan Rudi, M. 2014. Bureaucracy Reformation In Implementation Of Internal Supervision Functions In West Sulawesi. *International Journal of Academic Research*, 6, 134-138. Diakses Tanggal 10 Desember 2015.

[3] Choi, F. D. S., dan Gary K. M. 2011. *International Accounting*. Seventh Edition. Prentice Hall

- [4] CPA Australia Ltd. 2012. *A guide to understanding auditing and assurance: Listed Companies February 2013*. Australia. pp 8.
- [5] Cullinan, C. P., F. Wang, B. Yang, dan J. Zhang. 2012. Audit Opinion Improvement and the Timing of Disclosure Advances in Accounting, *Incorporating Advances in International Accounting* 28: 333-343.
- DeAngelo. L. 1981. *Auditor Independence, low balling, and disclosure Regulation*. *Journal of Accounting and Economics*.
- [6] Deni Darmawati, Khomsiyah dan Rika Gelar Rahayu. (2004). “*Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*”. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004.
- [7] Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. 2007. *Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting*. *Journal of Accounting and Economics*, 44, 193-223.
- [8] Effendi, Yuswar. 2013. Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 13 No. 1. Diakses Tanggal 25 Maret 2016
- [9] Fen, S. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern dan Konsekuensinya terhadap Auditor Switching*. Tesis-Tidak dipublikasi. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- [10] Fitriyani, Martani, dan D. Khairurizka, R. 2013. Tingkat Keseuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010 terhadap PP NO. 3/2007. *Proceeding PESAT*. Bandung. Diakses Tanggal 10 Desember 2015.
- [11] Ghozali, Imam. 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- [12] Ge, W. dan S. McVay. 2005. The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control after The Sarbanes–Oxley Act. *Accounting Horizons* 19 (3): 137– 158. Diakses Tanggal 10 Desember 2015.
- [13] Habib, A. 2013. A meta-analysis of the Determinants of Modified Audit Opinion Decisions. *Managerial Auditing Journal* 28 (3): 184-216. Diakses Tanggal 10 Desember 2015.
- [14] Harjanto, Nico. 2011. Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *ANALISrSCSIS*, Vol. 40, No.2: 138-159. Diakses Tanggal 18 Februari 2016.
- [15] Hendarto, Thomas Gatot. 2006. *Analisis Penerapan Konsep Materialitas Dan Tindak Lanjut Audit atas Suatu Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Pedoman Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah*. Tesis-Tidak dipublikasi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- [16] Henderson, J. V., dan A. Kuncoro. 2011. "[Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties](#). *Journal of Development Economics, Elsevier*, vol. 94(2), pages 164-180. Diakses Tanggal 18 Februari 2016.
- [17] Heriningsih, Sucahyo. Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi* Vol. 11, Hal 1-86. Diakses Tanggal 10 Desember 2015
- [18] Heriningsih, Sucahyo. Rusherli. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Lpaoran Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13. Nomor 02*. Diakses tanggal 10 Desember 2015.
- [19] Jensen, M dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360. Diakses Tanggal 10 Desember 2015
- [20] Kristanto, S. Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Auntansi UKRIDA*. Volume 9 Nomor 01. Diakses Tanggal 10 Desember 2015
- [21] Leuz, C. and Oberholzer-gee, F., 2006. Political Relationships , Global Financing , And Corporate Transparency: Evidence From Indonesia. *Journal of Financial Economics*. 81, 411–439. Diakses Tanggal 10 Desember 2015
- [22] Lasena, Sirajudin, 2012. *Analisis Faktor Pada Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011*. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- [23] Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andy Offset: Yogyakarta.
- [24] Marfiana, N. dan L. Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Diakses tanggal 22 Desember 2015.
- [25] Martani, Dwi. Zaelani, Fadzri. 2011. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. SNA 15. Aceh. Universitas Syah Kuala. Diakses tanggal 10 Desember 2015.
- [26] Myring, Mark dan Shortridge, Rebecca Toppe. 2010. Corporate Governance and The Quality of Financial Disclosures. *The International Business & Economics Research Journal*; Juni 2010; 9, 6; pg. 103.

[27] Miller, D. Sardais, C. 2011. Angel Agent: Agency Theory Reconsidered. *Academy of Management Perspectives*. Vol. 25 Issue 2, p6-13. 8p. Diakses tanggal 10 Desember 2015.

[28] Morris, J. J. 2011. The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting. *Journal of Information Systems*, 25, 129-157. Diakses tanggal 10 Desember 2015.

[29] Murhaban, 2010. Pengaruh Pengendalian Intern, Audit Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.

[30] Pancawati. 2010. Pengaruh Independensi, *Corporate Governance*, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Kajian Akuntansi*. Hal: 61 - 76 Vol. 2 No. 1.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 60 tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

[31] Puspita, R., & D. Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam *Website* Pemda. *Symposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23 September 2012. Diakses Tanggal 14 Januari 2016

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 (1) tentang Keuangan Negara.

_____, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

_____, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

_____, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

[32] Retno, Reny Diah dan Priantinah, Denies. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Nominal*. Vol. 1 No.1.

Robinson, R. 2006. Corruption, collusion and nepotism after Suharto: Indonesia's past or future? *IIAS Newsletter* 40. Diakses tanggal 10 Desember 2015.

[33] Sari, A. Pramita, dan Martani, D. Setyaningrum, D. 2015. *Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. SNA 18 Medan. Universitas Sumatera Utara 16-19 Sept 2015. Diakses tanggal 10 Desember 2015.

[34] Sekaran, U. dan R. Bougie, 2013. *Research Method for Business, A Skill Building Approach*. Sixth Edition, New York: John Willey & Sons Inc.

[35] Setyaningrum, D dan F. Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9 (2): 154-170. 24 November 2015

[36] Suhardjanto, D., Yulianingtyas dan R. Rukmita. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8 (1): 1-194. Diakses Tanggal 30 November 2015

[37] Taufikurrahman. 2014. *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit oleh BPK RI atas LKPD Provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

[38] Vijayakumar, A.N, dan Negaraja. N. 2012. Internal Control Systems: Effectiveness of Internal Audit in Risk Management at Public Sector Enterprises. *BVIMR Management Edge*. Vol. 5, No. 1, PP 1-8. Diakses Tanggal 10 Desember 2015.

World Bank (1989). *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*. Washington: World Bank

Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper
Universitas Muhammadiyah Surakarta

www.ntb.go.id Diakses Tanggal 27 November 2015

www.pekanbaru.go.id Diakses Tanggal 27 November 2015

www.bpk.go.id

www.kemendagri.go.id

www.antikorupsi.org